

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALINAU**



**RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan rahmatNya yang begitu besar sehingga proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD ini disusun sebagai acuan perencanaan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dalam penentuan Program dan Kegiatan tahun 2024. Didalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Renja tahun 2024 ini kami menyadari sangatlah mungkin terdapat beberapa kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karenanya diharapkan koreksi, kritik dan saran lebih lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kemajuan di masa yang akan datang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Malinau, Juli 2023

Sekretaris DPRD Kabupaten Malinau,



Dr. AFRI ST. PADAN, S.P., M.Si
NIP. 19740403 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulis.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD	35
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024.....	46
BAB V PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel T.C-29	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2023	10
Tabel T.C-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.....	18
Tabel T.C-31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024	22
Tabel T.C-33	Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	42
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2024.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.....	7
Gambar 3.1 Pohon Masalah	37
Gambar 3.2 Pohon Kinerja.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Sekretariat DPRD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Kepmen Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 67 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/32/Hukum Tanggal 13 Februari 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke

dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2024, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

Pada bagian ini berisikan Pengolahan Data dan Informasi, Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

Pada bagian ini menguraikan tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024**

Pada Bagian ini menjelaskan Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Pada Bagian ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

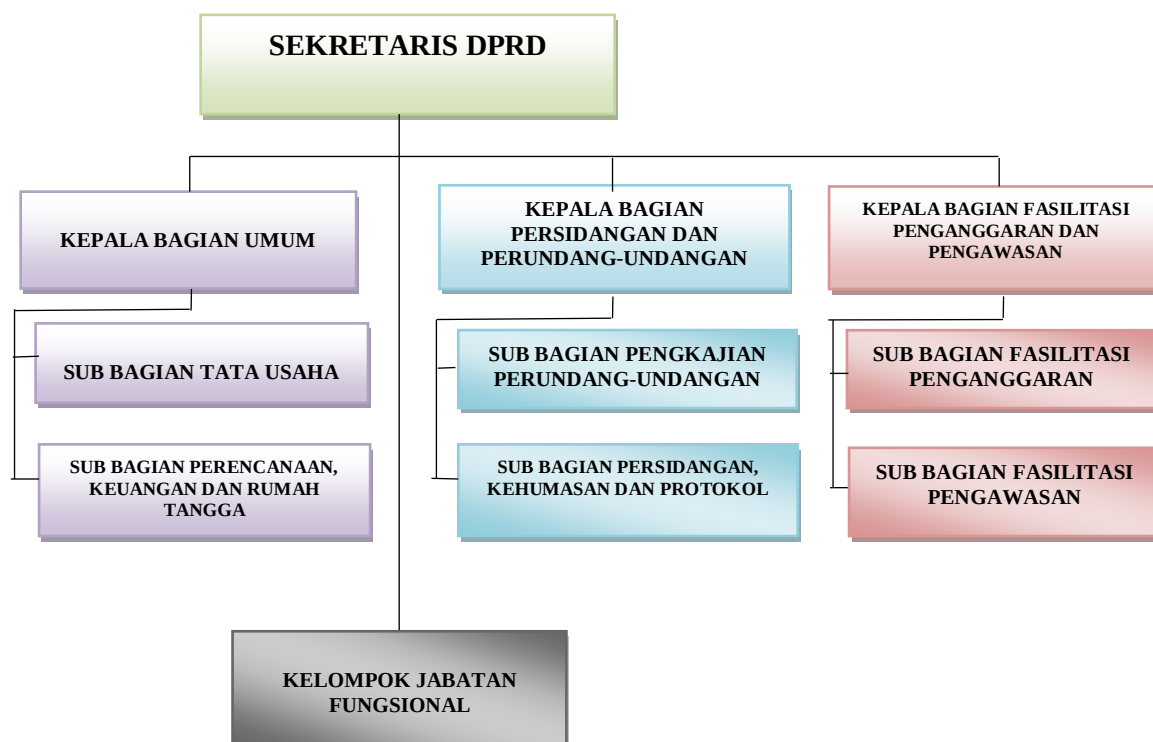
SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

Pengolahan Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan Administrasi dan pemberi dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Struktur Organisasi Pada Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KAB. MALINAU



Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Sekretariat DPRD memiliki Tujuan jangka menengah yang yaitu:

“Terselenggaranya Dukungan Layanan dan Fasilitas Sekretariat DPRD

Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”

Sekretariat DPRD yang memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD serta melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Produk DPRD
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Evaluasi realisasi capaian target diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan Renstra. Dengan kata lain capaian dilakukan untuk dapat mengetahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya juga dapat mengetahui program/kegiatan mana yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan. Hasil Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat Pada Tabel T-C.29 Berikut ini:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022
dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi Capaian Target renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%				95,38%			
4	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	100,00%	33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	100,00%
4	02	01	2,05		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah									
4	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	14 Orang	-	-	-	10 Orang	24 Orang	41,38%
4	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	10 Paket	10 Paket	4 Paket	40,00%	10 Paket	24 Paket	40,00%
4	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	5 paket	5 paket	5 paket	100,00%	5 paket	15 paket	50,00%
4	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	50,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi Capaian Target renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Penggandaan yang Disediakan								
4	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83 Laporan	7 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100,00%	15 Laporan	37 Laporan	44,58%
4	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
4	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
4	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
4	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
4	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	12 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00%	8 Unit	28 Unit	45,16%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi Capaian Target renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab	89 Unit	4 Unit	-	-	-	20 unit	24 Unit	26,97%
4	02	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	15 Unit	-	-	-	15 unit	30 Unit	40,00%
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									
4	02	01	2,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20 Orang/Bulan	20 Orang	20 org	20 Orang	100,00%	20 orang	20 Orang	100,00%
4	02	01	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	24 paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100,00%	4 Paket	12 Paket	50,00%
4	02	01	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	120 Orang	40 Orang	20 Orang	20 Orang	100,00%	20 Orang	80 Orang	66,67%
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD									
4	02	01	2,16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	50,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi Capaian Target renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	30 Paket	10 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00%	5 Paket	20 paket	66,67%
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%				88,33%			
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	60 Dokumen	12 Dokumen	10 dokumen	6 Dokumen	60,00%	10 Dokumen	28 Dokumen	46,67%
4	02	02	2,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	-	10 dokumen	-	0,00%	-	-	0,00%
4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran									
4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	150 Dokumen	23 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100,00%	25 Dokumen	73 Dokumen	48,67%
4	02	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	18 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	9 Dokumen	50,00%
4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggara Pemerintah									
4	02	02	2,03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 laporan	2 laporan	1 Laporan	-	0,00%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi Capaian Target renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	02	02	2,04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	36 Dokumen	5 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	83,33%	6 Dokumen	21 Dokumen	58,33%
4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									
4	02	02	2,05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	72 Laporan	10 Laporan	16 Laporan	12 Laporan	75,00%	12 Laporan	34 Laporan	47,22%
4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	360 Dokumen	80 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100,00%	60 Dokumen	180 Dokumen	50,00%
4	02	02	2,07		Pembahasan Kerja Sama Daerah									
4	02	02	2,07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Jenis Cideramata yang diadakan	12 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	25,00%
4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD									
4	02	02	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	69 Dokumen	9 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	39 Dokumen	56,52%
4	02	02	2,08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	5 Dokumen	8 Dokumen	33,33%

Berdasarkan tabel yang telah disajikan di atas dapat dijabarkan bahwa capaian kinerja program/kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau pada tahun 2022 dapat disampaikan baik, hal ini dilihat dari realisasi anggaran dan fisik tahun 2022. Sekretariat DPRD Melaksanakan 2 Program yang salah satunya menjalankan Program prioritas pembangunan Kabupaten Malinau yaitu Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program lainnya yaitu program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Pada Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota rata-rata Realisasi capaian Rencana Kerja pada tahun 2022 sebesar 95,38%, Sedangkan untuk program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD realisasi capaian di tahun 2022 sebesar 88,33%.

Dari data capaian kedua program tersebut dapat dilihat bahwa program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan Administrasi

dan pemberi dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Memfasilitasi Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya;

Berdasarkan uraian Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan–pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan

suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kegiatan kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down) sehingga peran serta masyarakat (stakeholder) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau 2024, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui tingkat Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau beberapa Tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel T.C-30 berikut ini:

Tabel T.C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Malinau

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda			85%	87%	88%	89%	92%	115%	88%	89%	
2	Nilai SAKIP			65	66	67	68	97%	92%	67	68	

Berdasarkan tabel yang telah disajikan di atas, pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi, ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Berdasarkan uraian pada tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada Indikator Kinerja Sasaran yaitu Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda pada Tahun 2022 dengan target 85% terealisasi 77,78% dengan Persentase Capaian sebesar 92% dan di tahun 2023 dan target sebesar 87% terealisasi sebesar 100% sehingga Persentase capaian 115% hal ini mengalami peningkatan sebesar 28,57% dari Tahun sebelumnya.

Pada Indikator Kinerja Sasaran untuk Nilai SAKIP Sekretariat DPRD pada Tahun 2022 dengan target Nilai 65, terealisasi dengan nilai 62,96 maka Persentase Capaiannya sebesar 97%, untuk Tahun 2023 Target Nilai SAKIP 66 Terealisasi dengan nilai 60,76 sehingga Capaiannya sebesar 92%, Hal ini mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD memperoleh nilai 60,76 Pada Kategori B dengan Interpretasi Baik Hal ini masih Perlu adanya Perbaikan Pada unit Kerja serta Komitmen Dalam Manajemen Kinerja.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan Administrasi terhadap tugas dan Fungsi DPRD.
2. Minimnya sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas Pendidikan dan Pelatihan sesuai tugas dan fungsi.
3. Terjadinya keterlambatan Penginputan dan Pelaporan Data Keuangan, Data Kinerja, dan Aset terhadap perubahan kebijakan/regulasi dalam aplikasi penyelenggaraan kesekretariatan dan keuangan;
4. Kurangnya Sarana perkantoran, Prasarana pendukung dan Penunjang dalam melaksanakan tugas Administrasi dan Kegiatan Operasional Sekretariat DPRD;
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mempublikasikan Kegiatan Sekretariat DPRD;
6. Belum optimalnya Pembahasan produk-produk hukum (raperda) oleh anggota DPRD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dibuat berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021-2026. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah telah dilakukan review. Dimana usulan Program dan Kegiatan yang diajukan didalam rancangan awal RKPD tidak semuanya dapat mengakomodir semua kebutuhan selama 1 (satu) tahun ke depan itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan sehubungan dengan kebijakan, arahan pimpinan dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi DPRD.

Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD dan analisis terhadap kebutuhan pada tahun 2024 terlihat pada Tabel T.C-31 di bawah ini:

Tabel T.C-31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Malinau

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				37.534.345.771					37.534.345.771	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.058.398.771					23.058.398.771	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.770.195.068					4.770.195.068	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.770.195.068	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.770.195.068	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				249.790.000					249.790.000	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Malinau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	249.790.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Malinau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	249.790.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				893.743.000					893.743.000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	217.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	217.500.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Malinau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	276.279.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Malinau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	276.279.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malinau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malinau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	199.964.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	199.964.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.679.920.395					2.679.920.395	
7	Penyediaan Jasa	Malinau	Jumlah Laporan	12 Laporan	380.000.395	Penyediaan Jasa	Malinau	Jumlah Laporan	12 Laporan	380.000.395	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Malinau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.299.920.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Malinau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.299.920.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				475.123.681					475.123.681	
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Malinau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	74.896.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Malinau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	74.896.000	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Malinau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab	21 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Malinau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab	21 Unit	250.000.000	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Malinau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	150.227.681	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Malinau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	150.227.681	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				10.746.751.927					10.746.751.927	
12	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Malinau	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20 Orang/Bulan	9.948.445.927	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Malinau	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak	20 Orang/Bulan	9.948.445.927	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
								Keuangan DPRD			
13	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Malinau	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	190.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Malinau	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	190.000.000	
14	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Malinau	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	608.306.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Malinau	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	608.306.000	
	Layanan Administrasi DPRD				3.242.874.700					3.242.874.700	
15	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Malinau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	242.879.700	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Malinau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	242.879.700	
16	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Malinau	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket	2.999.995.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Malinau	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket	2.999.995.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				14.475.947.000					14.475.947.000	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.000.000.000					3.000.000.000	
17	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	3.000.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	3.000.000.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran				1.022.500.000					1.022.500.000	
18	Pembahasan APBD	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	25 Dokumen	377.000.000	Pembahasan APBD	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	25 Dokumen	377.000.000	
19	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 Dokumen	645.500.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 Dokumen	645.500.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				397.119.400					397.119.400	
20	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Malinau	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	397.119.400	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Malinau	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	397.119.400	
	Peningkatan Kapasitas DPRD				426.606.000					426.606.000	
21	Pendalaman Tugas	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil	6 Dokumen	426.606.000	Pendalaman Tugas	Malinau	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	426.606.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	DPRD		Pendalaman Tugas DPRD			DPRD		Hasil Pendalaman Tugas DPRD			
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				6.096.921.600					6.096.921.600	
22	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Malinau	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	1.256.831.600	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Malinau	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	1.256.831.600	
23	Pelaksanaan Reses	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	4.840.090.000	Pelaksanaan Reses	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	4.840.090.000	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah				53.620.000					53.620.000	
24	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Malinau	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	3 Dokumen	53.620.000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Malinau	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	3 Dokumen	53.620.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD				3.479.180.000					3.479.180.000	
25	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	3.149.180.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	3.149.180.000	
26	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6 Dokumen	330.000.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6 Dokumen	330.000.000	
					37.534.345.771					37.534.345.771	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, maka SKPD menyusun berdasarkan Pagu Indikatif dan Produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top-down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang merupakan salah satu Wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi musrenbang tingkat RT/RW, musrenbang tingkat Desa, musrenbang tingkat Kecamatan, forum SKPD serta musrenbang Kabupaten. Pada tahap forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronisasikan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan Program/Kegiatan hasil Musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu Strategis yang sedang terjadi di Sekretariat DPRD dan masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan Program dan Kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tidak menerima langsung usulan program dan kegiatan masyarakat karena tupoksinya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Dewan baik secara langsung maupun usulan masyarakat melalui kegiatan Reses DPRD dalam rangka

menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Malinau.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, Struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreatifitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 pemerintah Kabupaten Malinau dalam RPJMD Tahun 2021-2026 telah menetapkan visi, misi dan Program kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih telah menetapkan visi dan misi yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Malinau, maka visi pembangunan Kabupaten Malinau 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malinau yang Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

• **Kabupaten Malinau yang Mandiri Bermakna:**

- Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.
- Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian,

kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

- Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

- **Kabupaten Malinau yang Damai Bermakna:**

- Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.

- **Kabupaten Malinau yang Sejahtera Bermakna:**

- Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan,

perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapandapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan social antar wilayah, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

• **Pemerintahan yang Profesional Bermakna:**

- Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan public yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (*Rule of law*) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan

baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelebagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Dalam upaya mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau 2021-2026, misi Pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal;
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, mengingat eratnya kaitan antara Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dengan dokumen RPJMD tersebut, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau harus diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Malinau,

Sekretariat DPRD berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-4 (empat) yaitu :

“Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, akan berupaya secara optimal untuk meningkatkan standar pelayanan, dan mendukung secara penuh pencapaian visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau periode 2021-2026

Dari rumusan diatas maka sekretariat DPRD Kabupaten Malinau memiliki visi misi sebagai berikut: **“Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang akuntabel, efektif dan efisien terhadap kinerja DPRD”**

Dengan ini nilai-nilai yang terkandung dalam Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Administrasi** : Berasal dari bahasa latin yaitu ad + ministrate yang berarti melayani, membantu memenuhi, dan memberi jasa, Alber Lepawskey mengatakan “Administrasi dalam arti luas adalah meliputi organisasi dan manajemen ;
2. **Akuntabel** : mempunyai pengertian bertanggungjawab, transparan dan dapat dipercaya serta jujur;
3. **Efektif dan Efisien** : Segala sesuatu urusan dapat menghasilkan nilai guna yang optimal apabila semua unsur diberdayagunakan secara optimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan atau dihasilkan atau dengan kata lain ingin dijadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan pada kurun waktu tertentu, Maka Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau menetapkan tujuan: **“Terselenggaranya Dukungan Layanan dan Fasilitas Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”**

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tertentu. sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas yang bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau diutamakan pada upaya tercapainya perwujudan Profesional aparatur yang mampu

mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan Tugas, fungsi dan wewenangnya, sebagai aplikasi dari pada tujuan maka sasaran Sekretariat DPRD sebagai berikut :

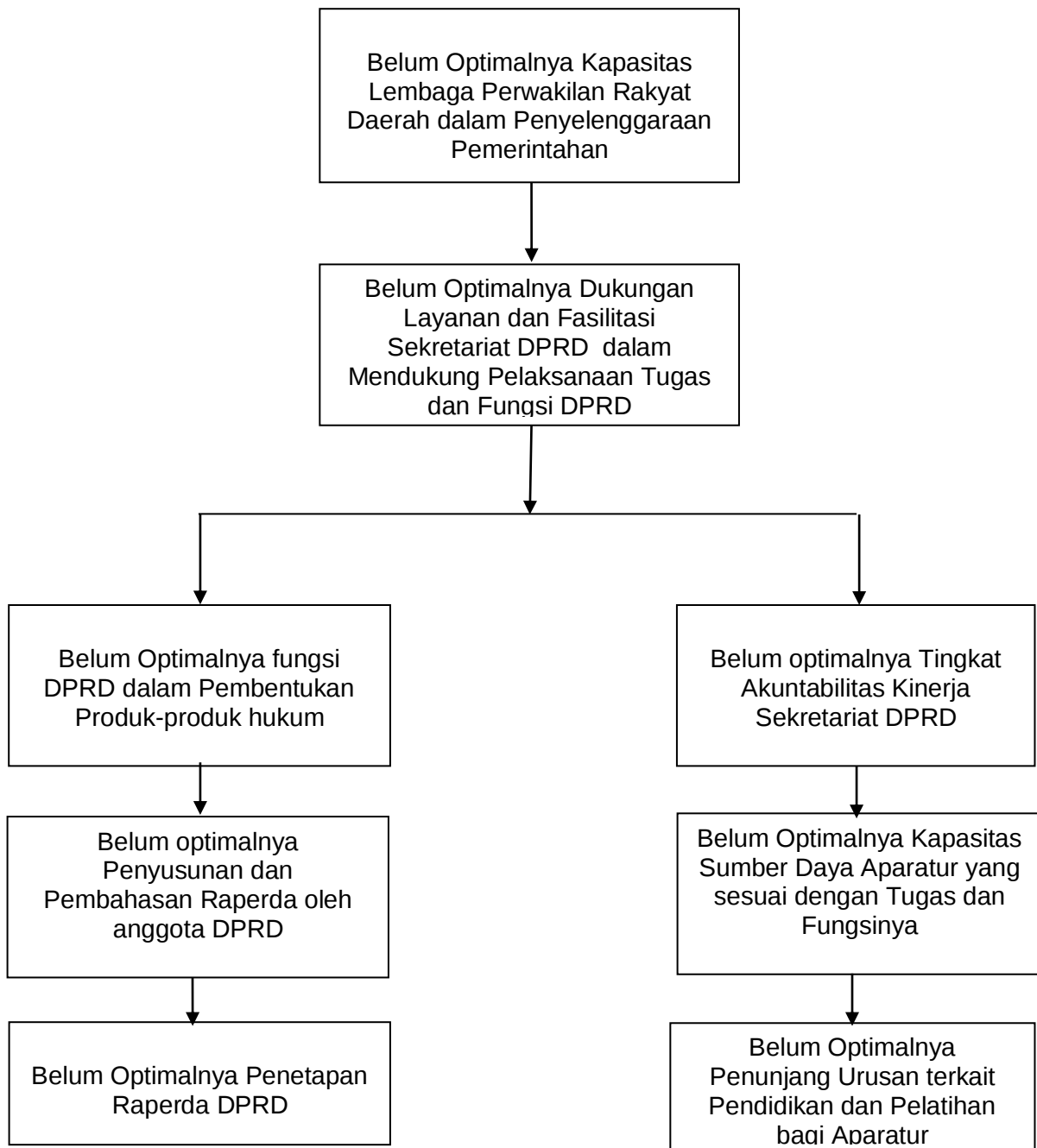
- 1) Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.

Dengan Indikator Tujuan/sasaran sebagai Berikut:

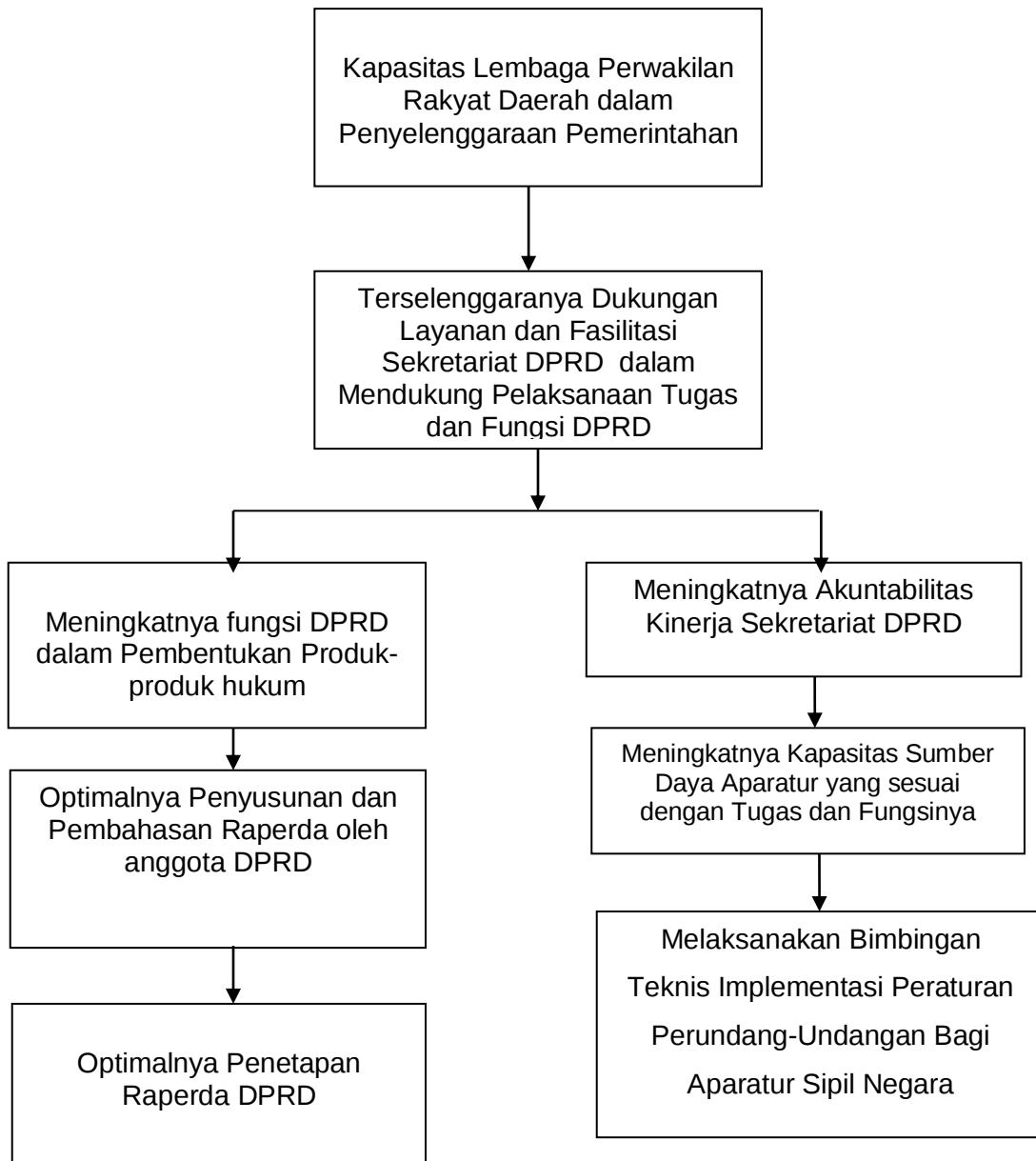
- 1) Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda
- 2) Nilai SAKIP

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau disajikan dalam Gambar 3.1 Pohon Masalah dan Gambar 3.2 Pohon Kinerja berikut ini:

Gambar 3.2
Pohon Masalah



Gambar 3.2
Pohon Kinerja



3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 berdasarkan programnya meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan lainnya

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya

F. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- 1) Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

G. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

- 1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

A. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 2) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

B. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- 1) Pembahasan APBD
- 2) Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD

C. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

D. Peningkatan Kapasitas DPRD

- 1) Pendalaman Tugas DPRD

E. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- 1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah

2) Pelaksanaan Reses

F. Pembahasan Kerjasama Daerah

1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah

G. Fasilitasi Tugas DPRD

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

2) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau adalah sesuai Tabel T.C-33 berikut ini:

Tabel T.C-33
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program/Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	02				SEKRETARIAT DPRD				37.534.345.771			38.534.345.771	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.058.398.771			23.236.797.971	
4	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.770.195.068			4.770.195.068	
4	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	33 Orang/b ulan	4.770.195.068	APBD		33 Orang/bul an	4.770.195.068
4	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				249.790.000			345.823.971	
4	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Malinau	10 Orang	249.790.000	APBD		10 Orang	345.823.971,00
4	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				893.743.000			877.190.324	
4	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Malinau	10 Paket	217.500.000	APBD		10 Paket	175.911.324,00
4	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Malinau	5 Paket	276.279.000	APBD		5 Paket	276.279.000,00
4	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Malinau	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	200.000.000,00
4	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Malinau	2 Dokum en		APBD		2 Dokumen	75.000.000,00
4	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	15 Laporan	199.964.000	APBD		15 Laporan	150.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program/Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.679.920.395		2.679.920.000			
4	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Malinau	12 Laporan	380.000.395	APBD		12 Laporan	380.000.000,00
4	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Malinau	12 Laporan	2.299.920.000	APBD		12 Laporan	2.299.920.000
4	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			475.123.681		500.227.681			
4	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Malinau	8 Unit	74.896.000	APBD		8 Unit	100.000.000,00
4	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab	Malinau	1 Unit 20 Unit	250.000.000	APBD		1 Unit 20 Unit	250.000.000
4	02	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Malinau	15 Unit	150.227.681	APBD		15 Unit	150.227.681
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			10.746.751.927		10.838.445.927			
4	02	01	2,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Malinau	20 Orang/ Bulan	9.948.445.927	APBD		20 Orang/ Bulan	9.948.445.927
4	02	01	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Malinau	4 Paket	190.000.000	APBD		4 Paket	190.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	01	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Malinau	20 Orang	608.306.000	APBD		20 Orang	700.000.000,00
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD				3.242.874.700				3.224.995.000
4	02	01	2,16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Malinau	1 Laporan	242.879.700	APBD		1 Laporan	225.000.000,00
4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Malinau	5 Paket	2.999.995.000	APBD		5 Paket	2.999.995.000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				14.475.947.000				15.297.547.800
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.000.000.000				3.000.000.000
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Malinau	10 Dokum en	3.000.000.000	APBD		10 Dokumen	3.000.000.000
4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				1.022.500.000				1.022.500.000
4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Malinau	25 Dokum en	377.000.000	APBD		25 Dokumen	377.000.000
4	02	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Malinau	3 Dokum en	645.500.000	APBD		3 Dokumen	645.500.000
4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				397.119.400				497.119.400
4	02	02	2,03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Malinau	1 Laporan	397.119.400	APBD		1 Laporan	497.119.400,00
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD				426.606.000				913.212.000
4	02	02	2,04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Malinau	6 Dokum en	426.606.000	APBD		6 Dokumen	853.212.000,00
4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Malinau	4 Dokum en		APBD		4 Dokumen	60.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program/Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			6.096.921.600					6.196.916.400
4	02	02	2,05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Malinau	12 Laporan	1.256.831.600	APBD		12 Laporan	1.356.826.400
4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Malinau	60 Dokum en	4.840.090.000	APBD		60 Dokumen	4.840.090.000
4	02	02	2,07		Pembahasan Kerja Sama Daerah			53.620.000					58.620.000
4	02	02	2,07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Malinau	3 Dokum en	53.620.000	APBD		3 Dokumen	58.620.000,00
4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD			3.479.180.000					3.609.180.000
4	02	02	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Malinau	12 Dokum en	3.149.180.000	APBD		12 Dokumen	3.149.180.000
4	02	02	2,08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Malinau	6 Dokum en	330.000.000	APBD		6 Dokumen	460.000.000,00
								37.534.345.771					38.534.345.771

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2024

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2024 rencana Kerja Sekretariat DPRD di tuang dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan, Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program/Kinerja	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DPRD				37.534.345.771	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.058.398.771	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.770.195.068	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	33 Orang/bulan	4.770.195.068	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				249.790.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Malinau	10 Orang	249.790.000	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah				893.743.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Malinau	10 Paket	217.500.000	APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Malinau	5 Paket	276.279.000	APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Malinau	1 Paket	200.000.000	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	15 Laporan	199.964.000	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.679.920.395	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Malinau	12 Laporan	380.000.395	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Malinau	12 Laporan	2.299.920.000	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				475.123.681	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Malinau	8 Unit	74.896.000	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab	Malinau	21 Unit	250.000.000	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Malinau	15 Unit	150.227.681	APBD

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kinerja	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	Dipelihara/Direhabilitasi				
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				10.746.751.927	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Malinau	20 Orang/Bulan	9.948.445.927	APBD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Malinau	4 Paket	190.000.000	APBD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Malinau	20 Orang	608.306.000	APBD
Layanan Administrasi DPRD				3.242.874.700	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Malinau	1 Laporan	242.879.700	APBD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Malinau	5 Paket	2.999.995.000	APBD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				14.475.947.000	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.000.000.000	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Malinau	10 Dokumen	3.000.000.000	APBD
Pembahasan Kebijakan Anggaran				1.022.500.000	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Malinau	25 Dokumen	377.000.000	APBD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Malinau	3 Dokumen	645.500.000	APBD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				397.119.400	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Malinau	1 Laporan	397.119.400	APBD
Peningkatan Kapasitas DPRD				426.606.000	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Malinau	6 Dokumen	426.606.000	APBD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				6.096.921.600	
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Malinau	12 Laporan	1.256.831.600	APBD
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Malinau	60 Dokumen	4.840.090.000	APBD
Pembahasan Kerja Sama Daerah				53.620.000	
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Malinau	3 Dokumen	53.620.000	APBD
Fasilitasi Tugas DPRD				3.479.180.000	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Malinau	12 Dokumen	3.149.180.000	APBD
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Malinau	6 Dokumen	330.000.000	APBD
				37.534.345.771	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana Program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024.

Substansi Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Sekretariat DPRD disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024, dan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.

2. Sekretariat DPRD berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024
3. Bagian-bagian dan semua unsur Pelaksana kerja pada Sekretariat DPRD agar segera menyusun Rencana Kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk setiap Program dan Kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.
5. Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2024 wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi Program dan Kegiatan tahun 2023.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau selain sebagai pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat DPRD, untuk dapat merealisasikan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja ini tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan Program dan Kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Semoga keberadaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan Program dan Kegiatan yang di

prioritas untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Malinau serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan Pembangunan Kabupaten Malinau.

Malinau, Juli 2023

Sekretaris DPRD Kabupaten Malinau,



Dr. AFRI ST. PADAN, S.P., M.Si
NIP. 19740403 200312 1 005